

SINOPSIS

Sejarah perpolitikan Indonesia (negara), kiranya sama tuanya dengan keberadaan militer di Republik ini. Mencipta diri sendiri dan terlahir di luar sistem politik menjadikan *ego self created* mereka tinggi menjulang dan tidak menghendaki otonominya di ganggu-gugat, kondisi ini tentunya di perparah lagi dengan tiadanya budaya *apolitis* di kalangan tentara sehingga kemudian lebih memudahkan para pemimpin memainkan peran-peran mereka.

Jejaring kekuasaan dan kekuatan orde Baru dengan militernya telah mampu mengintervensi sendi-sendi kehidupan sipil, implementasi Dwifungsi ABRI telah "menjarah" hak-hak demokratis rakyat dalam berpolitik dengan melakukan pengerucutan partai politik, interpretasi tunggal atas Pancasila, penangkapan dan penculikan tanpa melalui proses hukum dan lain sebagainya, kondisi ini dikemudian hari menjadikan militer tumbuh menjadi *the only instituonal legitimate to power*, sehingga melahirkan kekuasaan militer yang berlebihan (*military overreach*). Kepongahan regim Orde Baru harus lengser tatkala arus deras gerakan demokratis menyuarakan reformasi pada setiap lini kehidupan, jatuhnya Soeharto membuat militer sedikit oleng namun tidak begitu saja hancur.

Orde Reformasi membawa sejuta harapan bagi bangsa Indonesia dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan demokratis. Sejalan dengan kehendak reformasi, militer mendapatkan gugatan atas peran yang di miliki sebelumnya. Ialah penghapusan atas Dwifungs ABRI sebagai momok bagi kondisi transisional, pelucutan hak-hak istimewa yang dahulu di sandang oleh militer sedikit demi sedikit mulai dipereteli, adanya pemisahan struktur Tentara Nasional Indonesia dengan Polisi Republik Indonesia menjadi preseden postif bagi pembuka pintu demorasi, kemudian di susul dengan paradigma baru militer dalam menatap masa depan Indonesia yang kini mulai berbagi dengan pihak sipil dan tidak selalu di depan, namun kondisi transisional tentunya menyisakan ketidakpastian aturan permainan dan hal itu pula kiranya dapat ditilik dari ketidak-sepahaman para politisi sipil dalam melihat militer bahkan cenderung terkesan mengedepankan ego pribadi di atas kepentingan nasional Namun kondisi ini tidak timbul begitu saja, tanpa ada yang mempengaruhi ialah inkonsistensi para politisi sipil dalam mereposisi peran politik militer, masih gamang jika bukan tidak percaya diri apa yang dialami oleh politisi sipil, sebagaimana Abdurrahman Wahid memasukkan TNI dalam kabinetnya, begitupun kondisi yang dialami oleh partai politik, sikap moderatnya terkait penghapusan peran politik militer secara bertahap, dan masuknya para perwira pensiunan kedalam tubuh partai politik.

Melihat kenyataan bahwa militer masih mempunyai daya tawar yang tinggi, hal ini menyiratkan tidak adanya kesamaan persepsi diantara kekuatan-kekuatan sipil untuk bersama-sama, bagaimana memposisikan militer dan meminimalisir peran politik militer, Kondisi ini kemudian menandakan masih sulitnya menciptakan *civilian supremacy* tatkala kekuatan-kekuatan sipil masih terfragmentasi dan mengedepankan ego pribadi jika bukan ego partai di atas kepentingan nasional